

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI

Kusno, Masluyah Suib, Wahyudi

Program Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Email: kusno.ap10@yahoo.co.id

Abstract: This research aim to described of management of School's Aid Operational (BOS) in SD Negeri 01 Muara Pawan including of planning, execution, observation and evaluate, and also reporting of BOS. This Research use the approach qualitative by desain is case study. Research location in SD Negeri 01 Muara Pawan which is located in Ketapang-Sukadana street of Muara Pawan Subdistrict Ketapang Regency of West Borneo. Data Source in this research are headmaster, BOS bursar, school committee, and student's parent. Data obtained by interview, observation of participle and documentation. Data was analyse through 3 activity path are reducing, data display, and verification. Result of data analysis obtained by node that management of School's Aid Operational (BOS) in SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang as according to mechanism decanted in BOS guide-book covering planning element, execution, observation and evaluate, and also reporting of BOS fund.

Keywords: Management, BOS

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan program BOS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah SD Negeri 01 Desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang yang terletak di jalan Ketapang-Sukadana Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan orang tua siswa miskin. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tertuang di dalam buku panduan BOS yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan dana BOS.

Kata Kunci: Pengelolaan, BOS

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004 – 2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini berkurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Salah satu amanat rakyat kepada penyelenggara negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam tataran operasional adalah melalui pendidikan. Tilaar dan Nugroho (2009: 28) menyatakan bahwa pendidikan dalam kaitannya dengan manusia

sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat adalah upaya pengembangan kepribadian agar mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan menyumbangkan kemampuannya untuk masyarakat. Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu menetapkan serangkaian kebijakan pendidikan. Ada tiga pilar kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan yaitu: 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. BOS merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan.

Supardi dalam (Zainuddin, 2008:92) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*instrumental input*) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah karena biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dalam kaitannya dengan keuangan sekolah, Mulyasa (2006:195) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Dalam buku panduan BOS (2010:2) dinyatakan bahwa secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1) membebaskan seluruh siswa SD dan SMP dari biaya operasi sekolah, 2) membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan apapun baik di sekolah negeri maupun swasta, dan 3) meringankan biaya operasional sekolah terutama bagi sekolah swasta. Pencapaian tujuan program BOS mulai tampak berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemendiknas dalam (Puspitawati, 2006:3) yang menyebutkan bahwa penyaluran BOS berdampak positif antara lain: 1) Program BOS mengurangi beban orangtua untuk biaya pendidikan anak. Program BOS terbukti meningkatkan jumlah siswa yang terbebas dari pungutan biaya operasional sekolah/madrasah yaitu dari 28,4% pada tahun 2004/2005 menjadi 70,3% pada tahun 2005/2006, 2) Program BOS berhasil menurunkan angka putus sekolah dari 0,60% menjadi 0,40%, menurunkan tingkat ketidakhadiran dari 2,71% menjadi 2,14%, dan menurunkan angka mengulang kelas dari 1,73% menjadi 1,24%, serta meningkatkan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari 94,27% menjadi 96,70%, setelah digulirkannya program BOS sejak tahun 2005/2006.

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan

pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam pengertian cara kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Mulyasa (2006:194) menyatakan bahwa kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran. Sa'ud dan Makmun (2009: 17) menyatakan, "Perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan". Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepala sekolah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting.

Dalam manajemen pembiayaan, satu diantara instrumen yang penting adalah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan RAPBS mendasari pelaksanaan (akuntansi) dan evaluasi (auditing) program secara transparan, akuntabel dan demokratis. Penyusunan anggaran dan pengembangan RAPBS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: 1) laju pertumbuhan peserta didik, 2) inflasi, 3) pengembangan program dan perbaikan, dan 4) proses pengajaran dan pembelajaran.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada sekolah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dalam buku panduan BOS (2010:28-29) disebutkan bahwa penggunaan dana BOS dialokasikan pada beberapa jenis kegiatan yaitu: penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi dan buku teks pembelajaran, biaya pembelajaran tambahan dan ekstrakurikuler, biaya ulangan dan ujian, pembelian barang habis pakai, langganan daya dan jasa serta perawatan sekolah, honor guru dan kegiatan pengembangan profesi, transport siswa miskin, biaya pengelolaan BOS, pembelian komputer *desktop*, media pembelajaran dan mebel (jika masih ada sisa dana).

Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di tingkat sekolah diperlukan evaluasi pelaksanaan program BOS tersebut. Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi pengelolaan keuangan. Mulyasa (2006:205) menyatakan, "Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah".

Pengamatan awal pada SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang yang menjadi lokasi dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa pelaksanaan program BOS di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang berlangsung baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaannya. Kepala sekolah selalu menyampaikan

secara transparan penerimaan dan pengelolaan dana BOS kepada komite sekolah serta orang tua siswa.

Pemilihan lokasi penelitian di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan dilandasi ketertarikan penulis terhadap cara pengelolaan dana BOS SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan yang berbeda dengan SD Negeri lainnya di Kecamatan Muara Pawan. Semua SD Negeri yang ada di kecamatan Muara Pawan berusaha mengalokasikan dana pada 12 kegiatan pembiayaan yang tertera dalam buku panduan BOS. Sedangkan SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan hanya mengalokasikan dana BOS pada 10 kegiatan. Adapun 2 kegiatan pembiayaan yang tidak dilaksanakan oleh SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan adalah (1) pemberian transport bagi siswa miskin, dan (2) pembelian komputer *desktop*. Pemberian transport bagi siswa miskin tidak dilaksanakan karena ternyata 95% siswa SD Negeri 01 Muara Pawan bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi sekolah sehingga kebanyakan siswa menggunakan sepeda, berjalan kaki atau diantar oleh orang tua masing-masing untuk tiba di sekolah. Sedangkan pembelian komputer *desktop* belum dilaksanakan karena sekolah belum memiliki ruang komputer dan masih sedang dalam proses pengajuan kepada pemerintah pusat. Selain itu, sekolah telah memiliki 1 unit komputer *desktop* dalam kondisi baik dan siap pakai.

Menurut kepala sekolah, dana kedua kegiatan yang tidak dibiayai tersebut dialokasikan untuk menambah pendanaan empat kegiatan lainnya yaitu: 1) pembelian buku teks pelajaran, 2) pembiayaan kegiatan remedial, pengayaan, dan pemantapan persiapan ujian, 3) pembiayaan peralatan sekolah, dan 4) pengembangan profesi guru. Pengalihan alokasi dana ini ternyata telah mendapat persetujuan komite sekolah dan orang tua siswa dengan tujuan peningkatan rata-rata nilai ujian siswa. Strategi pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan ternyata berdampak positif dan terbukti berhasil meningkatkan rata-rata nilai ujian siswa.

Permasalahan yang masih dialami tim pengelola dana BOS di SD Negeri 01 Muara Pawan hanyalah pada persepsi orang tua siswa mampu yang beranggapan bahwa adanya dana BOS berarti tidak ada pembayaran apapun bagi pendidikan putra-putri mereka. Anggapan ini menurunkan peran serta orang tua dalam bentuk dukungan dana sukarela kepada sekolah untuk membiayai beberapa program ekstrakurikuler dan pengembangan diri siswa yang belum terealisasi melalui dana BOS. Padahal di dalam buku panduan BOS (2010:12) jelas menyatakan bahwa BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat bagi sekolah.

Kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara drastis. Hal ini berdampak pada sektor pendidikan yang ditandai antara lain dengan banyaknya siswa putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah serta ketidakmampuan siswa membeli alat tulis dan buku pelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan bantuan langsung tunai (BLT). Satu diantara program di bidang pendidikan adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam buku panduan BOS (Kemdiknas, 2010:9) disebutkan bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah kabupaten dan kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Bab IX pasal 62 menyebutkan bahwa, "Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal." Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Bantuan operasional sekolah (BOS) dalam bidang pendidikan secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional dan non operasional, namun karena biaya satuan yang digunakan adalah biaya rata-rata nasional maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Secara detail beberapa jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh dana BOS sangat banyak namun diprioritaskan untuk biaya operasional non personal bagi sekolah. Biaya operasional meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, uang lembur dan pengembangan profesi guru, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru, dan lain-lain). Biaya non operasional adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) evaluasi penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Tujuan dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Pembebasan biaya pendidikan diperuntukkan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Dalam lampiran 1 Permendiknas Nomor 76 Tahun 2012 disebutkan bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus, program BOS bertujuan untuk: 1) membebaskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI), 2) membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik

di sekolah negeri maupun swasta, 3) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Satu diantara indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun adalah diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program Wajib Belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun tersebut.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan per tahunnya sebesar: Rp 580.000 / siswa / tahun untuk siswa SD dan SDLB serta Rp 710.000 / siswa / tahun untuk siswa SMP, SMPLB dan SMPT. Dana BOS bagi daerah tidak terpencil disalurkan dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah secara triwulanan (tiga bulanan), yaitu: 1) Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2013, 2) Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2013, 3) Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2013.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: 1) pengembangan perpustakaan, 2) kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, 3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, 4) kegiatan ulangan dan ujian, 5) pembelian bahan-bahan habis pakai, 6) langganan daya dan jasa, 7) perawatan sekolah, 8) pembayaran honorarium bulanan Guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, 9) pengembangan profesi guru, 10) membantu siswa miskin, 11) pembiayaan pengelolaan BOS, 12) pembelian perangkat komputer, dan 13) biaya lainnya jika komponen nomor 1-12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Agar pengelolaan dana BOS berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dibentuklah tim manajemen BOS mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, penanggung jawab pelaksanaan program BOS adalah kepala sekolah dengan anggota bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan. Pengelolaan dana BOS yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan yang dilaksanakan oleh internal sekolah dalam hal ini kepala sekolah selaku ketua Tim Manajemen BOS sekolah. Pengelolaan dana BOS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan dana BOS.

Kajian tentang perencanaan selalu terkait dengan konsep manajemen dan administrasi karena perencanaan merupakan unsur dan fungsi yang pertama dan utama

dalam konsep manajemen maupun administrasi. Mulyasa (2006:173) menyatakan, “Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah”. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Rohiat (2010:110) menyatakan bahwa perencanaan program tidak hanya mencantumkan berapa biaya yang harus dikeluarkan, namun harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, pelaksana kegiatan, serta kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan.

Perencanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat ini. Dalam buku perencanaan dan penganggaran sekolah/madrasah (Kemdiknas dan Kemenag, 2011:8) disebutkan bahwa dalam menentukan kondisi sekolah saat ini, ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu: 1) melakukan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah, 2) membandingkan Hasil Evaluasi Diri (Kondisi Nyata) Sekolah/Madrasah dengan Acuan Standar Sekolah/ Madrasah, 3) merumuskan Tantangan (Utama/Prioritas) Sekolah/ Madrasah.

Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja sekolah/madrasah misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS merupakan sumber utama bagi sekolah/madrasah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah/ madrasah, dan kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Menurut Sagala (2010:224) dalam menyusun RAPBS harus diketahui lebih dulu budget yang tersedia, yaitu: 1) rencana operasional keuangan mencakup estimasi tentang pengeluaran untuk suatu periode/waktu, 2) rencana sistematis untuk efisiensi pemanfaatan tenaga, industri, dan 3) rencana keuangan yang diprioritaskan dengan pola pengawasan operasional pada masa datang suatu lembaga.

Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan *sharing* dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Misalnya untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana *blockgrant* atau lainnya yang bersifat lebih luwes.

Menurut Mulyasa (2006:176) untuk mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja.

Dana BOS yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar-mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan RAPBS (Mulyasa, 2006:177).

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Pelaksanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yaitu: 1) kegiatan penerimaan, 2) kegiatan pengeluaran sesuai RAPBS.

Kuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, oleh sebab itu perlu memperhatikan prosedur penggunaannya sehingga dapat maksimal membiayai kegiatan pendidikan yang telah dibuat dalam perencanaan (RAPBS).

Pelaksanaan kegiatan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi *otorisator*, *ordonator* dan bendaharawan. *Otorisator* adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. *Ordonator* adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Lasari (2011:2) mengemukakan dua jenis kegiatan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan anggaran keuangan sekolah, yaitu: 1) kegiatan pengendalian keuangan sekolah, dan 2) kegiatan proses pencatatan keuangan sekolah. Kegiatan pengendalian keuangan sekolah merupakan usaha-usaha seorang administrator agar kegiatan pengadaan dan penggunaan keuangan sekolah mengarah secara tepat pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal berkat adanya tindakan-tindakan secara bertanggung jawab, terbuka, jujur, tertib, cermat, kreatif, efektif, dan efisien. Pengendalian keuangan sekolah ini terutama pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), yakni suatu pernyataan mengenai uraian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan sekolah sebagai belanja sekolah selama satu tahun anggaran. Mulyasa (2006:177) menyatakan, "Sesuai dengan semangat Manajemen Berbasis Sekolah, kepala sekolah berwenang penuh untuk mengatur masalah pendanaan pendidikan di sekolahnya. Meskipun demikian, ia harus tetap memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaran".

Kegiatan proses pencatatan keuangan sekolah meliputi kegiatan penerimaan dan penyimpanan, penggunaan dan pertanggungjawabannya. Lasari (2011:2) menyatakan bahwa pencatatan harus dilakukan secara tanggungjawab, terbuka, jujur, tertib, cermat, aman, benar, sah, efektif, dan efisien oleh bendaharawan. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini diperlukan rekan kerja yang profesional atau bendaharawan yang memiliki pribadi yang sesuai serta memiliki pengetahuan dan kecakapan tentang keuangan yang memadai. Setiap penerimaan uang harus dicatat oleh bendaharawan dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai dengan jenis penerimannya.

Buku kas umum yaitu buku yang digunakan untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana untuk semua mata anggaran dari satu jenis sumber pendapatan. Buku kas pembantu adalah buku yang digunakan untuk pencatatan dan penggunaan dari setiap mata anggaran dari satu jenis sumber pendapatan (Buku kas Tabelaris).

Agar program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan (*monitoring*) secara efektif dan terpadu. Pengevaluasian menurut Amtu (2011:62) adalah “Proses pengawasan dan pengendalian *performa* sekolah untuk memastikan bahwa jalannya penyelenggaraan kegiatan di sekolah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.

Evaluasi yang dapat dilakukan pihak terkait terhadap pengelolaan dana BOS adalah evaluasi program penggunaan dana BOS. Evaluasi pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan oleh internal maupun eksternal sekolah. Evaluasi internal dilaksanakan oleh evaluator sekolah yaitu Tim Manajemen BOS sekolah. Evaluasi internal lebih bersifat pembinaan dan evaluasi diri. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak luar sekolah yang telah diberikan mandat oleh pemerintah untuk memeriksa ataupun melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program BOS yang dilaksanakan oleh sekolah. Pelaksana evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengawasan (*monitoring*) menurut Akdon (2009:192) perlu diselenggarakan secara sistematis dan objektif untuk menemukan apakah informasi mengenai jalannya kegiatan atau program dan keuangan telah dilakukan secara akurat dan dapat dipercaya. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Pelaporan adalah bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS di sekolah. Akdon (2009:204) menyatakan, “Laporan adalah komunikasi objektif dan teratur mengenai informasi fakta yang melayani tujuan manajemen”. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis oleh bendaharawan. Isi laporan pertanggungjawaban itu mengenai penerimaan

dan pengeluaran dana sekolah dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat setiap bulan dan setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan penggunaan anggaran BOS di sekolah dibuat dalam dua periode yaitu laporan bulanan dan laporan triwulan.

Laporan BOS kadang-kadang dilengkapi dengan pemeriksaan langsung terhadap pembukuan dan penyimpanan uang tunai serta tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan tersebut dimaksudkan agar bendaharawan dapat melaksanakan dengan benar, sah, efisien dalam menerima, menyimpan, dan menggunakan keuangan sekolah demi keselamatan keuangan sekolah. Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam satu bulan dan triwulan dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaporan ini disebut sebagai *auditing*. Cormark dalam (Mulyasa, 2006:178) menyatakan bahwa *auditing* (pertanggungjawaban) merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak.

Bila terjadi pemeriksaan keuangan BOS sekolah, perlu dibuat berita acara mengenai proses pemeriksaan dan hasilnya yang ditandatangani bendaharawan. Pihak berwenang melakukan pemeriksaan berita acara untuk memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan tugas bendaharawan dan sebagai dasar untuk pemeriksaan selanjutnya. Pada umumnya sekolah mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, karena keterbatasan kemampuan dan fasilitas serta adanya upaya untuk mengatur agar laporan penggunaan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam petunjuk pelaksanaan. Biasanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS hanya disampaikan pihak sekolah kepada satuan kerja kabupaten/kota tanpa disampaikan kepada orang tua murid, sehingga mengabaikan unsur transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Untuk menjamin pengelolaan dana BOS transparan dan akuntabel serta mampu memenuhi tuntutan dan rasa keadilan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan anggota komite sekolah agar dapat mengambil peran yang semestinya dan benar-benar berfungsi sebagai lembaga kontrol yang efektif baik dalam proses perumusan RAPBS maupun pada aspek pemanfaatan dana-dana sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya memahami dan mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan. Sukmadinata (2010:94) menyatakan, "Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya". Penelitian dilakukan melalui penyelidikan dan pengamatan semua objek yang diteliti dengan mengungkapkan semua fakta yang ada pada saat penelitian berlangsung, mengenai pengelolaan dana BOS di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah desain studi kasus yang berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam data mengenai pengelolaan dana BOS di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang, yang dihasilkan melalui wawancara yang mendalam, pengamatan non partisipan, catatan lapangan, serta data dokumenter.

Peneliti turun langsung ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan fokus penelitian yang berhubungan dengan evaluasi pelaksanaan program BOS di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan. Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumen dan peristiwa yang diobservasi. Peneliti sekaligus bertindak sebagai instrumen penelitian dalam kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan wawancara mendalam, mencatat dan mengamati objek-objek yang terkait dengan fokus penelitian.

Penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen utama penelitian sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan seperti pedoman wawancara, observasi, dan catatan lapangan, serta alat bantu lain seperti foto dan dokumen tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau target penelitian. Sebagai instrumen penelitian, peneliti bertindak sebagai observer (pengamat) atas fenomena-fenomena yang terjadi, interviewer (pewawancara) terhadap informasi di lapangan yang dilakukan secara terperinci untuk mendapatkan data yang komprehensif atas fenomena yang diteliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan.

Penelitian kualitatif bersifat subjektif dan reflektif. Refleksivitas penelitian kualitatif merupakan pengkajian yang cermat dan hati-hati terhadap seluruh proses penelitian (Sukmadinata, 2010:105). Sedangkan subjektivitas penelitian kualitatif bersifat interpersonal. Keterampilan peneliti dalam membina hubungan interpersonal memegang peranan penting seperti kemampuan menumbuhkan kepercayaan, menjaga hubungan baik, tidak menilai, menghormati norma situasi dan sensitif terhadap isu-isu etika. Lamanya peneliti berada di lapangan sejak minggu kedua bulan Februari tahun 2012 hingga minggu ketiga bulan April 2012. Untuk kegiatan wawancara dilaksanakan selama tiga minggu karena menyesuaikan kondisi dan kegiatan kepala sekolah, komite sekolah, guru, orang tua dan siswa. Sedangkan pelaksanaan observasi dilakukan sepanjang kegiatan penelitian dimana peneliti datang ke sekolah pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang keadaan sarana prasarana sekolah, kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan. Sedangkan pengumpulan dokumen yang diperlukan juga dilakukan sepanjang kegiatan penelitian karena tidak semua data yang diperlukan dapat langsung terkumpul.

Lokasi penelitian berada di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang yang terletak di jalan Ketapang – Siduk Kilometer 13 Desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Proses

belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 11.35 WIB. Saat ini SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan memiliki akreditasi B. Jumlah siswa tahun pelajaran 2012/2013 adalah 277 siswa dengan 12 rombongan belajar. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah selaku ketua Tim Manajemen BOS SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan, bendahara BOS, Komite Sekolah, Guru, orang tua siswa yang termasuk kategori miskin dan siswa yang termasuk dalam kategori miskin yang bersekolah di SDN 01 Muara Pawan serta pihak lain yang berkompeten

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik observasi ini dilakukan untuk memperoleh sejumlah informasi dalam kaitannya dengan konteks masalah yang berhubungan dengan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan. Objek yang diobservasi terkait dengan fokus penelitian diantaranya adalah: 1) sarana prasarana sekolah yang dibeli atau diperbaiki dengan dana BOS, 2) buku notulen rapat perencanaan BOS, 3) buku-buku administrasi keuangan BOS, 4) berkas laporan keuangan BOS, 5) lingkungan sekolah. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan. Sedangkan Dokumen yang dihimpun dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan program BOS di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pawan seperti: surat-surat, RAPBS, buku kas, catatan keuangan, foto-foto kegiatan, serta berkas laporan keuangan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian kasus dilakukan melalui 3 alur kegiatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2009: 91) yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini meliputi kegiatan seleksi terhadap data-data yang sudah dikumpulkan dari hasil penelitian dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, yaitu uraian-uraian mengenai temuan selama kegiatan penelitian. Selain itu, untuk memudahkan memahami pemaparan data penelitian, maka digunakan pula tabel-tabel dalam penyajian data. Data yang disimpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara, data hasil observasi, dan data yang diperoleh dari dokumen penunjang.

Sebelum data dianalisis, maka data yang terkumpul haruslah memenuhi keabsahan data artinya memiliki kebenaran yang sesuai dengan penelitian. Untuk itu, dilakukan uji kredibilitas dengan cara melakukan triangulasi sumber dan teknik, *member check* dan melakukan uraian rinci. Penelitian dilaksanakan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perencanaan BOS yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS sekolah diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran pendapat dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun bersama oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua/wali siswa. Pembahasan secara bersama dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan yang berkepentingan di sekolah akan menghasilkan suatu perencanaan yang cermat, efektif, dan efisien dalam pengelolaan dana BOS. Terkait dengan paparan data

mengenai perencanaan BOS di SD Negeri 01 Muara Pawan dapat disampaikan beberapa temuan, penelitian sebagai berikut: 1) perencanaan melibatkan seluruh komponen sekolah meliputi kepala sekolah selaku ketua Tim Manajemen BOS sekolah, komite sekolah, dewan guru, serta perwakilan orang/wali siswa, 2) sebelum merumuskan RAPBS diawali dengan melakukan evaluasi diri sekolah serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah, 3) sekolah bersikap terbuka dalam proses perencanaan dimana bersedia menerima saran dan masukan dari komite, guru, dan orang tua/wali siswa, 4) ada respon positif dan komitmen bersama dari seluruh komponen sekolah untuk memajukan sekolah melalui penyusunan RAPBS sekolah.

Pelaksanaan merupakan implementasi dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan dan tertuang dalam RAPBS. Pelaksanaan program BOS harus diupayakan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun bersama oleh komponen sekolah mulai dari kegiatan penerimaan dana BOS hingga kegiatan pengeluaran sesuai RAPBS. Terkait dengan pelaksanaan program BOS di SD Negeri 01 Muara Pawan dikemukakan temuan penelitian sebagai berikut: 1) terdapat dua komponen kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS SD Negeri 01 Muara Pawan dalam mengalokasikan anggaran BOS yaitu: (a) pembelian komputer *desktop*, dan (b) pemberian transport siswa miskin, 2) Kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS SD Negeri 01 Muara Pawan mengalihkan alokasi dana dua kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk empat kegiatan peningkatan mutu pendidikan siswa yaitu: (a) pembelian buku teks pelajaran, (b) pembiayaan kegiatan remedial, pengayaan, dan pemantapan persiapan ujian, (c) pembiayaan peralatan sekolah, dan (d) pengembangan profesi guru, 3) masih kurangnya dukungan orang tua/wali siswa dalam mendukung pendanaan melalui sumbangan sukarela.

Terkait pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program BOS di SD Negeri 01 Muara Pawan dikemukakan beberapa temuan penelitian, sebagai berikut: 1) Kepala sekolah melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program BOS secara internal terhadap bendahara BOS dengan cara memeriksa buku kas pemasukan dan pengeluaran yang disusun bendahara, 2) Kepala sekolah mengawasi semua kegiatan pembinaan potensi non akademik siswa (kegiatan ekstrakurikuler) maupun kegiatan pembinaan potensi akademik siswa yang didanai dari anggaran BOS, 3) Adanya respon positif dari bendahara BOS dan guru pelaksana kegiatan pembinaan siswa mengenai pengawasan yang dilakukan kepala sekolah, 4) Sekolah secara kontinu mendapatkan pengawasan dan evaluasi eksternal dari lembaga pengawas yang ditunjuk pemerintah.

Kegiatan pelaporan pelaksanaan program BOS yang dilaksanakan di SD Negeri 01 Muara Pawan, antara lain: 1) membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan sebagai bahan informasi bagi kepala sekolah serta untuk meminimalkan kesalahan penyusunan laporan yang akan dikirim kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten, 2) sistematika penyusunan laporan telah sesuai dengan petunjuk penyusunan laporan yang tertuang dalam buku panduan BOS.

Pembahasan

Agar pengelolaan dana BOS dapat terserap secara efisien dan efektif dalam proses pendidikan di SD Negeri 01 Muara Pawan, diperlukan manajemen pengelolaan keuangan yang baik. Permana (2005:2) menyatakan, “Manajemen keuangan sekolah

merupakan proses perencanaan, penggalan sumber, penyusunan anggaran dan penggunaan serta pelaporan keuangan di tingkat sekolah/madrasah”. Perencanaan dapat dikatakan sebagai fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan pada intinya merupakan upaya pendefinisian kemana sebuah organisasi akan menuju di masa depan dan bagaimana sampai pada tujuan itu. Sedangkan rencana (*plan*) adalah hasil dari proses perencanaan yang berupa sebuah cetak biru (*blueprint*) mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.

Tahapan perencanaan keuangan dimulai dari penyusunan rencana anggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Komponen esensial dari penganggaran adalah: 1) rencana, 2) operasional dan sumber daya, 3) keuangan, 4) menyeluruh/komprehensif, dan 5) koordinasi. Penyusunan anggaran dalam perencanaan program BOS SD Negeri 01 Muara Pawan tanpa disadari ternyata memperhatikan beberapa poin di atas seperti: 1) membuat perencanaan melalui APBS, 2) perencanaan anggaran disesuaikan dengan keadaan, perubahan lingkungan dan kebutuhan sekolah, 3) penyusunan anggaran telah melibatkan seluruh komponen sekolah.

Pelaksanaan pada dasarnya terdiri dari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh sekolah. Pada tingkat sekolah dasar, sumber biaya adalah dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah, dari masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga atau yayasan serta orang tua siswa berupa iuran sekolah maupun sumber lainnya. Sedangkan pengeluaran adalah alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai, misalnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan proses belajar mengajar, ketatausahaan, sarana dan prasarana sekolah, gaji dan pengembangan sumber daya manusia sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Dalam biaya pengeluaran sekolah dipakai istilah pengeluaran rutin atau yang bersifat berulang tiap-tiap tahun, seperti gaji, barang yang harus sering diganti. Sedangkan pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama seperti gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga dan fasilitas belajar lainnya.

Pengelolaan keuangan BOS akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran (Koswara, 2010:4). Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, implementasi merupakan salah satu fungsi administrasi keuangan, yaitu dimulai dari pengajuan pencairan biaya, transaksi kegiatan berupa serah terima uang dan pembuatan kwitansi. Pembukuan (*Accounting*) merupakan pola kegiatan yang sangat pokok dalam sistem administrasi keuangan yang tertib. Pembukuan bertujuan agar dana yang dipakai dapat mencapai hasil yang maksimal, efisien dan efektif guna membiayai kegiatan. Pembukuan yang efektif mempunyai indikator mencegah penyalahgunaan uang yang menyimpang dari prosedur anggaran yang telah ditentukan, mencegah adanya pemborosan dalam pembiayaan, mencegah defisit anggaran dan melakukan verifikasi (pembuktian) bahwa anggaran yang ada telah digunakan sesuai dengan rencana kerja

yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pembukuan ini diperlukan tata buku, organisasi yang bertugas menyelenggarakan pembukuan dan sistem transaksi.

Pelaksanaan kegiatan menuju arah tujuan dengan menggunakan sumber daya yang relatif terbatas, memerlukan adanya pengawasan dan pengendalian yang bertujuan antara lain agar semua komponen sistem bergerak secara koordinatif, integratif dan sinerjik menuju ke satu arah pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembiayaan, pengawasan dan pengendalian penting dilakukan dengan tujuan agar sumber daya finansial yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Koswara (2010:1) menyatakan bahwa kepala sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi *Ordonator* untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi *Ordonator* untuk menguji hak atas pembayaran. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan keuangan dan mengoreksi kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. Pengawasan dapat secara internal dan eksternal, dapat pula dilakukan secara struktural maupun fungsional yang mencakup pemeriksaan, pembinaan dan evaluasi. Sedangkan pengendalian cenderung dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung, sebagai upaya korektif dan antisipatif terhadap pelaksanaan tugas pengelola.

Bagian akhir dari pengelolaan BOS adalah penyusunan laporan. Suatu laporan hendaknya disusun secara sistematis dan mudah dibaca oleh siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan program BOS yang dilaksanakan sekolah. Permana (2005:9) menyatakan, "Pelaporan merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi praktik manajemen keuangan. Pelaporan bermaksud memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kegiatan yang telah direalisasikan berdasarkan rencana yang telah dibuat". Pelaporan keuangan BOS merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS terhadap publik dalam hal ini masyarakat dan orang tua siswa. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan seperti yang telah disampaikan pada bab IV dan V, maka dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut: 1) Perencanaan BOS di SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim Manajemen BOS sekolah dengan melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan yang dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah dan analisis SWOT. Rumusan perencanaan program BOS yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS sekolah selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang komprehensif dan terkoordinasi antara kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan orang tua/wali siswa, 2) Pelaksanaan BOS di SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang meliputi dua kegiatan utama

yaitu penerimaan dalam bentuk melakukan pencairan dana BOS berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan serta melaksanakan kegiatan pengeluaran dengan mengimplementasikan dana BOS pada sebagian besar kegiatan yang tertuang di dalam buku panduan dan RAPBS yaitu: (a) membeli buku penunjang untuk pengembangan perpustakaan, (b) melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru, (c) membiayai kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, (d) membiayai kegiatan ulangan dan ujian, (e) melakukan pembelian bahan-bahan habis pakai, (f) membayar langganan daya dan jasa, (g) melakukan perawatan ringan infrastruktur sekolah, (h) membayar honorarium bulanan Guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, (i) membiayai kegiatan pengembangan profesi guru, dan (j) membiayai pengelolaan dana BOS, 3) Pengawasan dan evaluasi BOS di SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang dilaksanakan secara internal dan eksternal sehingga sumber daya finansial dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan dan evaluasi secara internal dilaksanakan oleh kepala sekolah berkoordinasi dengan ketua komite sekolah yang bersifat pembinaan dan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program serta pembukuan keuangan oleh bendahara. Sedangkan pengawasan secara eksternal bersifat audit yang dilaksanakan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah seperti Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten, BPKP dan Bawasda, 4) Pelaporan BOS di SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang dilaksanakan secara per bulan, triwulan, dan per tahun dengan format penyusunan laporan mengikuti petunjuk penyusunan laporan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik terutama terhadap orang tua siswa.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan penelitian, dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 1) Sesuai dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, hendaknya perencanaan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar sesuai dengan buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh Pemerintah, 2) Pengelolaan dana BOS perlu melibatkan peran aktif orang tua (komite) serta hendaknya dilakukan secara transparan melalui laporan pertanggungjawaban publik dengan demikian fungsi kontrol akan dapat berjalan efektif, 3) Dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan sekolah yang efektif, kepala sekolah perlu melakukan kegiatan: (a) merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan, (b) melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun, 3) Kepala sekolah perlu mengatur agar laporan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam petunjuk pelaksanaan dan perlu dilaporkan juga kepada orang tua siswa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. (2009). *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta
- Amtu, O. (2011). *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta

- Kemdiknas. (2010). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*
- Kemdiknas dan Kemenag. (2011). *Perencanaan dan Penganggaran Sekolah/Madrasah: Pedoman Penyusunan Untuk Kepala Sekolah/Madrasah*. Hasil Kerjasama Bilateral Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama dengan USAID
- Koswara, E. (2010). *Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif*. <http://koswaraero.blogspot.com/2010/04/pengelolaan-manajemen-keuangan-sekolah.html>. Diakses tanggal 4 Januari 2013
- Lasari, E. (2011). *Manajemen Keuangan Sekolah*. <http://winawimala.wordpress.com/2011/04/11/manajemen-keuangan-sekolah/>. Diakses tanggal 4 Januari 2013
- Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Permana, J. (2005). *Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Sumber Dana*. Bahan Diklat Manajemen Berbasis Sekolah MTs. Angkatan III Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2005.
- Puspitawati, S. (2006). *Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Sebagai Upaya Mencerdaskan Anak Bangsa*. Artikel Website Bulan November. www.ham.go.id/download.php?id=185533...1. Diakses tanggal 5 Januari 2013
- Sa'ud, U. S dan Makmun, A. S. (2009). *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Zainuddin, H. M. (2008). *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar